
PERPECAHAN MASYARAKAT AKIBAT PERBEDAAN PILIHAN POLITIK PRA PEMILU DAN PASCA PEMILU

Nia Alya Rista¹, Shinta Silvia Desnatalia Gulo², Kezia Maranatha Br Tarigan³, Sisi Olivia Sinaga⁴, Christian Cendy Hasahatan Sirait⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Negeri Medan

¹niaalyarista@gmail.com, ²shintasdgulo@gmail.com,
³keziamaranatha390@gmail.com, ⁴sisiolivia007@gmail.com,
⁵christian78sirait@gmail.com

ABSTRACT

Elections are the clearest expression of popular sovereignty in a democracy, yet public trust in electoral outcomes in Indonesia remains split along partisan lines, and differences in political choice increasingly spill over into everyday social relationships. This study examines how differences in political choice shaped social relations among students and parents at Universitas Negeri Medan (UNIMED) before and after the 2024 general election, and identifies the forms of division that emerged. Using a qualitative interview approach, data were collected from eight informants representing supporters of three presidential candidate pairs, non-voters (golput), and a first-time voter without voting rights, then analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that relations before the election were generally calm, with families acting as an early filter against excessive partisanship. Divisions that did emerge were mainly driven by candidate fanaticism, the double-edged role of social media in reinforcing echo chambers, statements by political elites, and golput as a form of political protest. After the election, personal relationships recovered relatively quickly, while tension persisted longer on social media and contributed to declining public trust in government and election institutions. The study concludes that strengthening individual awareness, the protective role of the family, welfare-oriented government policy, and digital literacy are essential to prevent similar social divisions in future elections.

Keywords: *political polarization, general election, social division, voter apathy (golput), public trust*

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan wujud paling nyata dari kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi, namun kepercayaan publik terhadap hasil pemilu di Indonesia masih terbelah berdasarkan basis dukungan politik, dan perbedaan pilihan politik semakin merembes ke ranah hubungan sosial sehari-hari. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perbedaan pilihan politik memengaruhi hubungan sosial masyarakat sebelum dan sesudah Pemilu 2024 di lingkungan mahasiswa dan orang tua mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED), serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perpecahan yang muncul. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara terhadap delapan informan yang mewakili pendukung tiga pasangan calon presiden, kelompok golput, dan seorang pemilih pemula yang belum memiliki hak pilih, kemudian data dianalisis melalui reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan sosial sebelum pemilu relatif kondusif, dengan keluarga berperan sebagai filter awal terhadap fanatisme politik berlebihan. Perpecahan yang muncul terutama dipicu oleh fanatisme terhadap pasangan calon, peran media sosial yang bersifat dua sisi melalui mekanisme echo chamber, sikap tokoh politik, serta fenomena golput sebagai bentuk protes politik. Pascapemilu, hubungan personal antarindividu cenderung cepat pulih, sementara ketegangan di media sosial bertahan lebih lama dan turut menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kesadaran individu, peran protektif keluarga, kebijakan pemerintah yang berorientasi kesejahteraan, serta literasi digital menjadi kunci untuk mencegah perpecahan sosial serupa pada pemilu-pemilu berikutnya.

Kata Kunci: polarisasi politik; pemilu; perpecahan sosial; golput; kepercayaan publik

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan pemilihan umum menjadi wujud paling nyata dari kedaulatan tersebut. Namun, keberhasilan demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilu semata, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat mempercayai proses dan hasilnya. Survei Indikator Politik Indonesia pascapemilihan presiden 2024 mencatat bahwa 73,3 persen masyarakat percaya terhadap putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun kepercayaan tersebut terbelah sesuai basis dukungan politik: mayoritas pendukung pasangan calon pemenang percaya, sementara mayoritas pendukung pasangan calon yang kalah justru tidak percaya (*Indikator Politik Indonesia, 2024*). Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu pun terus menurun pascapemilu (*Lembaga Survei Indonesia, 2024*), yang menurut Gustrinanda (2023) turut diperparah oleh maraknya berita bohong (*hoaks*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) selama tahun politik.

Keterbelahan kepercayaan publik semacam ini mencerminkan persoalan yang lebih luas, yaitu polarisasi politik. Tadjia, Akbar, dan Fauzi (2025) mencatat bahwa Pemilu 2024 ditandai oleh meningkatnya polarisasi politik, terutama terkait pencalonan tokoh kontroversial yang memicu perdebatan tajam antara pendukung dan penentang. Polarisasi politik didefinisikan sebagai perpecahan masyarakat ke dalam dua kelompok yang memiliki kepentingan, arah tujuan, atau posisi yang saling bertentangan, dengan perbedaan tajam dalam keyakinan dan sikap politik yang sering kali sulit dipertemukan (Tadjia et al., 2025), dan dapat terjadi baik di

tingkat elite maupun massa pemilih (Rianadiwa, Solakhudin, Salam, & Rahmawati, 2024). Faturahman, Azahra, Perdika, Akmal, Kamila, dan Khoirotun (2024) menemukan bahwa media sosial berperan besar dalam memperkuat polarisasi melalui mekanisme *agenda setting* dan *echo chamber*, di mana narasi yang beredar cenderung memperkuat keyakinan kelompok tertentu.

Selain polarisasi, perbedaan pilihan politik juga memunculkan fenomena golongan putih (*golput*), yaitu sikap tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu karena alasan teknis maupun pertimbangan politis tertentu, yang kerap dimaknai sebagai bentuk protes terhadap struktur politik yang berlaku (Asmarani, Putri, & Jayanti, 2024). Pada Pemilu 2024, sekitar 40 juta warga negara yang memiliki hak pilih tercatat tidak menggunakannya (Fanel & Winanda, 2025). Golput dipengaruhi oleh faktor sosiologis, psikologis, dan rasional (Farizi, 2026), dan meskipun secara hukum pelakunya tidak dikenai sanksi pidana, fenomena ini tetap dianggap dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa perbedaan pilihan politik dapat berdampak jauh melampaui hasil pemungutan suara, hingga merembes ke ranah personal seperti hubungan keluarga dan pertemanan. Namun, kajian yang ada masih berfokus pada data survei berskala besar (Indikator Politik Indonesia, 2024; Lembaga Survei Indonesia, 2024) atau studi kasus di wilayah tertentu (Farizi, 2026), sementara pengalaman personal masyarakat dari berbagai posisi politik dalam menjalani perpecahan sosial akibat pilihan politik belum banyak digali secara mendalam.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana perbedaan pilihan politik memengaruhi hubungan sosial masyarakat sebelum pemilu?; (2) bagaimana kondisi hubungan sosial masyarakat setelah pemilu di tengah perbedaan pilihan politik?; dan (3) apa saja bentuk perpecahan yang muncul akibat perbedaan pilihan politik dan bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan tersebut?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana perbedaan pilihan politik memengaruhi hubungan sosial masyarakat sebelum pemilu; (2) mengetahui kondisi hubungan sosial masyarakat setelah pemilu di tengah perbedaan pilihan politik; serta (3) mengidentifikasi bentuk-

bentuk perpecahan yang muncul akibat perbedaan pilihan politik serta mengetahui bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai kondisi dan pandangan informan sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Medan (UNIMED) pada 24 September 2026. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang, yang terdiri atas mahasiswa UNIMED dan orang tua mahasiswa. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik penelitian sehingga dapat memberikan informasi yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto atau bukti kegiatan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data berupa pedoman wawancara dan telepon pintar (handphone) sebagai alat bantu dokumentasi serta pencatatan hasil wawancara.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dari wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran mengenai temuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan mahasiswa dan orang tua mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED), diperoleh gambaran yang beragam mengenai pengalaman personal masyarakat menghadapi perbedaan pilihan politik pada Pemilu 2024, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Untuk menjaga kerahasiaan identitas, kedelapan informan diberi kode sebagai berikut: Informan 1 (mahasiswa) dan Informan 2 (orang tua

mahasiswa) pendukung Paslon 01; Informan 3 dan Informan 4 (mahasiswa) pendukung Paslon 02; Informan 5 (mahasiswa) pendukung Paslon 03; Informan 6 dan Informan 7 (mahasiswa) golput; serta Informan 8, pemilih pemula yang belum memiliki hak pilih. Variasi posisi politik ini memungkinkan peneliti membandingkan bagaimana perbedaan pilihan politik dirasakan dan dimaknai dari berbagai sudut pandang, sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Kondisi Hubungan Sosial Masyarakat Sebelum Pemilu

Secara umum, suasana di lingkungan keluarga, pertemanan, dan tempat kerja menjelang Pemilu 2024 relatif kondusif, meskipun preferensi politik sudah mulai terlihat sejak tahap ini. Informan 1 menuturkan suasana rumahnya justru ramai secara positif karena keluarga menonton debat capres-cawapres bersama, sementara Informan 4 menyebut lingkungannya aman dan damai tanpa kericuhan. Sejumlah informan menunjukkan adanya upaya preventif dari keluarga untuk menjaga independensi pilihan politik; Informan 3, misalnya, mengaku dibimbing orang tuanya agar memilih sesuai keinginan sendiri tanpa ikut-ikutan teman, yang memperlihatkan peran keluarga sebagai filter awal terhadap fanatisme politik berlebihan. Bahkan Informan 8, yang belum memiliki hak pilih, sudah merasakan perbedaan pandangan politik melalui pengamatannya terhadap perdebatan antargenerasi dalam keluarganya sendiri.

Dasar pertimbangan pilihan politik pun bervariasi antarindividu: Informan 1 dan 3 memilih berdasarkan kecocokan visi-misi paslon, Informan 2 menekankan keinginan perubahan menyeluruh dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), Informan 4 dan 5 mempertimbangkan rekam jejak (track record) masing-masing calon, sementara Informan 6 dan 7 menilai tidak ada satu pun paslon yang layak dipilih sehingga memutuskan golput. Keragaman dasar pertimbangan ini sejalan dengan pandangan Rianadiwa dkk. (2024) bahwa polarisasi politik tidak semata-mata lahir dari perbedaan kebijakan, tetapi juga dari perbedaan identitas dan orientasi nilai setiap individu.

2. Faktor Pemicu dan Bentuk-Bentuk Perpecahan

Mayoritas informan menilai fanatisme terhadap satu pasangan calon sebagai pemicu utama perpecahan. Informan 1 menyoroti sikap membela paslon secara berlebihan tanpa mempertimbangkan bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda, sementara Informan 3 menambahkan bahwa fanatisme yang menuntut

kemenangan mutlak justru memicu gesekan sosial. Informan 5 bahkan menilai fanatisme berlebihan pada akhirnya membuat sebagian pendukung merasa malu sendiri ketika kinerja paslon pilihannya tidak sesuai ekspektasi.

Peran media sosial dalam memperkuat maupun meredakan perbedaan pendapat juga dipandang beragam. Informan 1, 3, dan 5 menilai media sosial lebih sering memperbesar perbedaan pendapat karena penggunaanya cenderung mempertahankan fanatisme masing-masing, sedangkan Informan 2 dan 4 berpandangan media sosial dapat membantu masyarakat saling memahami, asalkan informasi disaring secara rasional mengingat media sosial juga rawan disinformasi. Perbedaan pandangan ini menegaskan media sosial sebagai pedang bermata dua, sejalan dengan temuan Faturahman dkk. (2024) yang menyoroti peran algoritma media sosial dalam memperkuat keyakinan kelompok tertentu melalui mekanisme echo chamber.

Sikap dan ucapan tokoh politik maupun pejabat publik turut disorot memperkeruh keadaan. Informan 1 mengkritik gestur simbolis dukungan politik, seperti pose jari, yang dinilai dapat memicu perpecahan, sementara Informan 2 menyoroti fenomena pendukung yang tetap mengklaim kinerja calon sebagai baik meskipun faktanya kurang memuaskan. Menariknya, Informan 3 justru berpendapat tidak ada tokoh politik yang memperkeruh keadaan, menunjukkan bahwa persepsi terhadap peran elite politik dalam memicu polarisasi juga bergantung pada posisi politik masing-masing individu.

Bentuk perpecahan lain yang muncul dari hasil wawancara adalah sikap golput sebagai respons terhadap ketidakpuasan politik. Informan 6 dan 7, yang keduanya memilih golput, menyatakan bahwa golput bagi mereka bukan sekadar apatisme, melainkan bentuk protes terhadap seluruh pasangan calon yang dinilai tidak layak; Informan 7 bahkan menegaskan golput dapat menjadi sinyal bagi pemerintah bahwa calon yang ditawarkan tidak sesuai aspirasi masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan temuan Farizi (2026) bahwa golput dipengaruhi oleh faktor psikologis dan rasional, termasuk ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada.

3. Kondisi Hubungan Sosial Masyarakat Setelah Pemilu

Pada umumnya, hubungan personal antarindividu yang sempat merenggang akibat perbedaan pilihan politik cenderung kembali pulih dalam waktu relatif singkat

setelah pemilu usai. Informan 1 mengaku pernah berdebat dengan teman yang memilih paslon lain karena alasan yang dinilainya kurang substansial, namun hubungan tersebut kembali baik karena dianggap sebatas perbedaan pendapat biasa. Pola serupa dialami Informan 4 dan 5, yang menyebut perdebatan dengan rekan sejawat hanya bersifat “debat kusir” tanpa dampak jangka panjang pada hubungan pertemanan. Informan 3 bahkan mengaku tidak pernah mengalami keretakan hubungan sama sekali karena menganggap pilihan politik sebagai urusan pribadi masing-masing.

Meskipun demikian, ketegangan yang mereda di ranah interaksi personal tidak sepenuhnya berlaku di ranah media sosial. Informan 1 menyebut bahwa meskipun lingkungan sekitarnya sudah tenteram, perdebatan dan saling sindir masih kerap terjadi di media sosial, sementara Informan 3 menyoroti isu program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai topik yang masih memicu perdebatan daring. Temuan ini mengindikasikan adanya disparitas antara ruang sosial personal, yang relatif lebih cepat pulih karena didukung kedekatan emosional dan interaksi langsung, dengan ruang digital, yang cenderung mempertahankan polarisasi lebih lama karena sifatnya yang lebih anonim. Sementara itu, Informan 6 dan 7 yang berposisi netral sebagai golput mengaku tidak merasakan permusuhan di lingkungan sekitar mereka pascapemilu, bahkan Informan 6 mengamati bahwa sejumlah orang di sekitarnya justru menyesali pilihan politik yang telah mereka buat setelah melihat realitas pascapemilu.

4. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Selain berdampak pada relasi sosial, perbedaan pilihan politik dan dinamika pascapemilu juga memengaruhi tingkat kepercayaan sebagian informan terhadap pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu. Informan 1 menyatakan kepercayaannya menurun karena menilai janji-janji pemerintah sulit dipegang, sementara Informan 3 dan 4 mengaku kecewa dengan kinerja pemerintahan terpilih, termasuk kritik terhadap pelaksanaan program MBG. Informan 5 bahkan mengaitkan turunnya kepercayaan tersebut dengan respons negatif pasar modal terhadap pernyataan presiden terpilih, yang tercermin dari pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Bagi Informan 6 dan 7, rendahnya kepercayaan terhadap seluruh kontestan politik sejak awal menjadi alasan utama keduanya memilih golput. Temuan ini memperkuat pandangan Gustrinanda (2023) mengenai

pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu sebagai indikator keberhasilan demokrasi, yang terus dievaluasi masyarakat pascapemilu.

5. Harapan dan Solusi Masyarakat

Terkait upaya mencegah perpecahan serupa terulang pada pemilu berikutnya, para informan menawarkan pandangan yang saling melengkapi. Informan 1 menekankan pentingnya menghindari sikap fanatik dan menghargai perbedaan pilihan orang lain, sementara Informan 2 berharap adanya pengarahan dari pemerintah mengenai batasan sikap yang baik dalam berpolitik. Informan 3 dan 4 menyarankan agar setiap individu kembali pada hati nurani masing-masing tanpa mengintervensi pilihan orang lain, serta bersedia menerima hasil pemilu secara lapang dada (legowo). Informan 5 menilai kunci utama menjaga soliditas masyarakat terletak pada kebijakan pemerintah yang adil dan berorientasi kesejahteraan, karena akar kericuhan sosial kerap bersumber dari kemiskinan dan ketimpangan. Informan 6 mengusulkan penguatan prinsip pemilu langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER), termasuk menjaga kerahasiaan pilihan pribadi agar tidak memicu gesekan di media sosial, sementara Informan 5 dan 8 menekankan pentingnya kebijaksanaan bersikap tanpa memperbesar perbedaan pendapat menjadi konflik berkepanjangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap delapan informan dari berbagai posisi politik, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pilihan politik memengaruhi hubungan sosial masyarakat baik sebelum maupun sesudah Pemilu 2024, meskipun dengan intensitas dan bentuk yang berbeda-beda. Sebelum pemilu, perbedaan pilihan sudah mulai terlihat melalui variasi dasar pertimbangan politik masing-masing individu, namun umumnya belum memicu konflik terbuka karena adanya peran keluarga sebagai filter awal. Bentuk-bentuk perpecahan yang muncul selama proses pemilu terutama dipicu oleh fanatisme, peran media sosial yang bersifat dua sisi, sikap elite politik, serta fenomena golput sebagai bentuk protes politik. Pascapemilu, hubungan personal antarindividu relatif cepat pulih, tetapi ketegangan cenderung bertahan lebih lama di ruang media sosial dan turut berdampak pada menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kesadaran individu, peran keluarga, kebijakan

pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan, serta literasi digital sebagai upaya bersama untuk mencegah perpecahan sosial akibat perbedaan pilihan politik pada pemilu-pemilu berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, S. D., Putri, V. M., & Jayanti, W. D. (2024). Analisis Perilaku Golput Dikalangan Masyarakat Dan Aspek Hukum Golput Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 812–823. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12928444>
- Fanel, C. A., & Winanda, N. R. (2025). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024. *Jurnal Fenomena*, 13(2), 176–190.
- Farizi, M. R. (2026). Analisis Faktor Penyebab Golongan Putih (Golput) pada Pemilu 2024 di Kelurahan Kebonjati Kota Sukabumi. *Jurnal Praxis Idealis*, 2(2). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.5270>
- Faturahman, R., Azahra, N., Perdika, A. T., Akmal, F. M., Kamila, N. R., & Khoirotnun, P. (2024). Polarisasi Sebagai Bentuk Efek Negatif Dalam Pembentukan Opini Publik Pada Pemilihan Presiden 2019. *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 99–115.
- Gustrinanda, R. (2023). Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemilu. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 3(1), 100–106. <https://doi.org/10.58737/jpled.v3i1.102>
- Indikator Politik Indonesia. (2024, 21 April). *Persepsi Publik atas Penegakan Hukum, Sengketa di MK, dan Isu-Isu Terkini Pasca-Pilpres*. Diakses dari <https://indikator.co.id>
- Lembaga Survei Indonesia. (2024, 18 April). *Sikap Publik terhadap Putusan KPU, Persidangan MK, dan Isu Nasional*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.
- Rianadiwa, S., Solakhudin, F., Triadi Salam, V., & Rahmawati, N. (2024). Upaya Pencegahan Polarisasi Politik di Tahun Pemilu 2024. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1), 169–179. <https://doi.org/10.26593/jsh.v4i01.7548>
- Tadja, S. V., Akbar, S. M., & Fauzi, M. A. N. (2025). Polarisasi Politik dalam Pemilu 2024: Pro dan Kontra Prabowo sebagai Presiden dalam Bayang-Bayang 1997/1998. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 32–38. <https://doi.org/10.26593/jsh.v2i02.6199>